



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SRIWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **A. MUSLIM**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **90775**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah Seluas 17500 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA INDRALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 9375 m2 di KAB / KOTA INDRALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 520.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2SV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000



4. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RUS 1.8 RS CVT CKD Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.660.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	266.776.577
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.572.436.577
III. HUTANG	Rp.	317.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.255.436.577

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.